

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

Analisis kebijakan pendirian satuan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Aceh Selatan dianalisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C Edwards III, implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu: (1) Proses Komunikasi/Sosialisasi, (2) Dukungan Sumberdaya, (3) Dukungan Disposisi, dan (4) Dukungan Struktur birokrasi. (5) Konsistensi implementasi kebijakan. Kelima faktor ini merupakan tolak ukur penilaian implementasi kebijakan pendirian satuan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses Komunikasi/Sosialisasi dalam implementasi Kebijakan pendirian satuan pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Aceh Selatan terkait dengan sosialisasi tidak dilakukan dengan baik, penyampaian informasi kepada masyarakat hanya bagi masyarakat yang datang ke dinas untuk mengusulkan pendirian sekolah baru saja dengan cara tanya jawab dengan kepala dinas atau kepala bidang SD atau SMP. Dinas Pendidikan Aceh Selatan belum memiliki buku pedoman pendirian satuan pendidikan dasar dan menengah. Kejelasan informasi tentang syarat pendirian satuan pendidikan dasar dan menengah belum dipahami dengan baik oleh masyarakat yang mengusulkan pendirian sekolah baru di daerahnya. Dinas Pendidikan Aceh Selatan belum konsisten mengimplementasikan kepmendiknas 060 tahun 2002

sebagai contoh dinas tidak dapat menolak apabila ada intruksi Bupati Aceh Selatan untuk pendirian sekolah baru di wilayah Aceh Selatan walau pendirian sekolah tersebut tidak sesuai dengan kepmendiknas nomor 060/U/2002.

2. Dukungan sumberdaya dalam implementasi Kebijakan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Aceh Selatan belum dilaksanakan sesuai dengan keputusan menteri pendidikan nasional (Kepmendiknas) nomor 060/U/20002 oleh Dinas Pendidikan Aceh Selatan. Penyampaian informasi syarat pendirian sekolah baru tidak disampaikan secara baik kepada masyarakat yang mengusulkan. Usulan pendirian sekolah baru dapat diwujudkan apabila telah dilakukan studi kelayakan, studi kelayakan dilakukan oleh tim verifikasi. Pembentukan Tim verifikasi merupakan kewenangan kepala dinas dengan kepala bidang pembinaan SD dan SMP. Pada penelitian ini Peneliti tidak mendapatkan bukti seperti SK pembentukan Tim verifikasi, laporan tertulis atau resume hasil dari hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh tim verifikasi. Kemudian fasilitas sekolah yang dibangun pada tahun 2014 dan tahun 2016 masih kurang karena pembangunan sekolah itu tergantung pada anggaran yang dikucurkan pemerintah.
3. Dukungan disposisi dalam implementasi Kebijakan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Aceh Selatan, dukungan disposisi sudah dilakukan seperti pengangkatan birokrasi dalam hal ini staf yang terlibat dalam tim verifikasi dibentuk oleh kepala Dinas Pendidikan Aceh Selatan akan tetapi tidak ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK).

Pemberian insentif untuk tim verifikasi studi kelayakan juga tidak ada, staf yang terlibat dalam tim diberikan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas).

4. Dukungan struktur birokrasi dalam implementasi Kebijakan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Aceh Selatan, struktur birokrasi belum berjalan dengan baik di Dinas Pendidikan Aceh selatan seperti dalam menjalankan Standard Operasional Prosedur (SOP) belum jelas dan teratur, buku pedoman pendirian sekolah baru belum dimiliki oleh dinas, ini menjadi kendala apabila ada mutasi penjabat dilingkungan Dinas Pendidikan. Kemudian pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam tim verifikasi tidak ada, verifikasi dilakukan secara bersama-sama, tugas peran dan fungsi masing-masing anggota tim tidak dijabarkan secara konkrit.
5. Konsistensi Implementasi kepmendiknas nomor 60 tahun 2002 dalam Kebijakan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Aceh Selatan, implementasi regulasi ini banyak yang tidak terpenuhi dengan baik, seperti tidak adanya dokumen hasil studi kelayakan, tidak jelasnya rencana induk pengembangan sekolah baru, sumber peserta didik tidak dipetakan atau kurang dari syarat minimal 3 sekolah dibawahnya, guru dan tenaga kependidikan tidak merata serta sarana dan prasarana pada sekolah yang dibangun masih kurang seperti belum ada perpustakaan dan laboratorium untuk praktek siswa.

5.2. IMPLIKASI

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, berikut ini dikemukakan beberapa implikasi yang dianggap relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan temuan hasil penelitian dalam proses komunikasi/sosialisasi dalam implementasi Kebijakan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Aceh Selatan dari sisi informasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan hanya kepada panitia pembangunan sekolah mengenai syarat dan ketentuan pendirian sekolah baru sangatlah terbatas. Hal tersebut berimplikasi pada kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat sehingga mereka mudah mengusulkan pendirian sekolah kepada kepala dinas pendidikan maupun langsung kepada kepala Bupati Aceh Selatan.
2. Berdasarkan temuan penelitian, dukungan Sumberdaya dalam implementasi Kebijakan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Aceh Selatan ditinjau dari staf yang terlibat dalam tim verifikasi tidak di SK kan akan berimplikasi staf tidak merasa terikat pada tim maka akan terjadi kurangnya rasa tanggungjawab dalam bekerja. Syarat pendirian tidak terpenuhi akan berimplikasi pada lemahnya hasil studi kelayakan sehingga sekolah yang dibangun akan kurang diminati mengakibatkan peserta didik kurang dari rombel, guru tidak lengkap. Fasilitas sekolah minim akan berimplikasi pada tersendatnya proses belajar mengajar, target kurikulum tidak tercapai dan akan lemahnya kompetensi siswa.

3. Dari hasil temuan penelitian dukungan disposisi dalam implementasi Kebijakan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Aceh Selatan, tim verifikasi tidak diberikan insentif hal ini berimplikasi pada lemahnya komitmen dan tanggungjawab tim, motivasi tim berkurang.
4. Dari hasil temuan penelitian dukungan Struktur Birokrasi ditinjau dari pelaksanaan Standard Operasional Prosedur (SOP) dinas pendidikan belum berpedoman dengan baik pada Kepmendiknas nomor: 060/U/2002. Hal ini berimplikasi pada hasil studi kelayakan yang kurang baik. Ditinjau dari Pembagian tugas dan tanggung jawab tim verifikasi yang tidak jelas maka akan berimplikasi pada kinerja tim akan menurun, personil yang ada dalam tim tidak mengetahui uraian tugasnya serta akan terjadi tumpang tindihnya penilaian mengakibatkan kebijakan yang diambil menjadi kurang tepat.
5. Dari hasil temuan penelitian tentang implementasi kepmendiknas nomor 60 tahun 2002, ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi seperti tidak adanya dokumentasi hasil studi kelayakan akan berimplikasi pada kelayakan sekolah yang dibangun tersebut diragukan. Jumlah sekolah pendukung kurang dari 3 sekolah akan berimplikasi pada jumlah siswa minim dalam satu kelas . Jumlah guru mata pelajaran kurang akan berimplikasi pada mutu pendidikan akan menurun. Rencana pengembangan sekolah tidak tersusun dengan baik akan berimplikasi pada tidak adanya pedoman sekolah dan pengembangannya untuk lima tahun ke depan. Sarana dan prasarana tidak lengkap akan berimplikasi pada terganggunya proses belajar mengajar di sekolah akan berdampak pada rendahnya mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Selatan.

5.3. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah peneliti paparkan, berikut dikemukakan beberapa rekomendasi kepada berbagai pihak:

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan direkomendasikan supaya sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama yang dibangun tahun 2014 dan tahun 2016 segera dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti peralatan laboratorium, perpustakaan serta tenaga pendidik atau guru.
2. Dinas Pendidikan Aceh disarankan agar melengkapi fasilitas, sarana dan prasarana yang belum lengkap pada delapan (8) sekolah menengah atas (SMA/SMK) yang di bangun tahun 2014 di Aceh Selatan.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI disarankan agar dalam membuat perencanaan pembangunan sekolah baru mesti memperhatikan dari segala aspek kebutuhan gedung dan sarana prasarana serta menganggarkan kelengkapan sarana pendukung lainnya di sekolah baru secara lengkap.
4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia disarankan untuk melakukan pengawasan dan teguran terhadap penyimpangan implementasi Kepmendiknas nomor 60 tahun 2002 di Aceh Selatan.
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia disarankan untuk meninjau dan mengamati secara langsung sekolah baru didirikan sebelum mengeluarkan nomor pokok sekolah nasional (NPSN).